

Sistem Pengendalian Internal dalam Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah

Sigit Sugiarto

Email : paints15sigit@gmail.com
Politeknik Nusantara Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama author : Sigit Sugiarto

E-mail : paints15sigit@gmail.com

*Received : 29 Desember 2023, Revised: 10 Januari 2024, Accepted: 05 Februari 2024
Published : 29 Februari 2024*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Inspektorat Sulawesi Selatan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh sehingga jumlah sampel 49 responden. Metode analisis data menggunakan metode analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Kata kunci : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Akuntabilitas Laporan keuangan

Abstract: This study aims to determine the influence of the government's internal control system on the accountability of the South Sulawesi government's financial statements. The data collection technique uses primary data obtained from questionnaires. The population in this study is all auditors who work at the South Sulawesi Inspectorate Office. The sampling technique in this study uses a saturated sampling technique so that the number of samples is 49 respondents. The data analysis method uses a simple linear regression analysis method. The results of the study show that the Government Internal Control System has a positive and significant effect on the Accountability of Government Financial Statements.

Keywords: Government Internal Control System, Accountability of Financial Statements

I. PENDAHULUAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000). Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diamanatkan untuk membuat laporan keuangan, terdiri dari laporan

realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Akuntabilitas merupakan tingkat perhitungan yang biasanya adalah pertanggungjawaban laporan keuangan dari suatu kegiatan.

Peningkatan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu diterapkan sistem pengendalian intern untuk menghindari adanya kecurangan. Dengan penerapan pengendalian intern yang baik, diharapkan dapat tercipta laporan keuangan pemerintahan daerah yang akuntabel, tentunya dengan tata kelola pemerintahan yang baik (Sukmaningrum, 2009). Dalam suatu organisasi, pengendalian internal adalah mutlak diperlukan untuk menjamin arah yang sesuai dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Menurut Tuanakota (2013:127) Pengendalian Internal merupakan jawaban manajemen untuk menangkal risiko yang diketahui, atau dengan perkataan lain untuk mencapai suatu tujuan pengendalian. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Semakin baik sistem pengendalian intern maka semakin akuntabel laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amijaya (2019) dan Ayem & Kusumasari (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah

II. LITERATUR REVIEW

Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976) tentang hubungan keagenan yakni semacam kontrak antara prinsipal dan agen. Pada penelitian ini yang dimaksud agen adalah masyarakat dan principal adalah pemerintah. kaitannya dengan hubungan pemerintah dalam hal ini eksekutif yang bertindak sebagai agent dengan masyarakat sebagai principal dalam teori agensi berpendapat bahwa akan terjadi asimetri informasi karena pemerintah memiliki lebih banyak informasi mengenai sumber daya yang dimiliki daerah dalam bentuk APBN/APBD dibandingkan dengan masyarakat. Asimetri informasi ini dapat mengakibatkan konflik antara dua pihak (Nurdin, 2015). Permasalahan yang terdapat dalam permasalahan tersebut dapat diatasi apabila akuntabilitas pemerintah daerah dengan baik. Salah satu upaya dengan menunjukkan hasil kinerja dalam bentuk LAKIP, maka agency problem yang mungkin terjadi dapat dikurangi, karena masyarakat sebagai principal dapat melihat dan mengukur hasil kinerja pemerintah daerah.

Akuntabilitas Laporan Keuangan

Tanjung (2008:9) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pengertian akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009:20) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan

pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggung jawabannya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas menurut Mursyidi (2013:44) yaitu “mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”. Akuntabilitas mengacu pada pertanggung

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam Mardiasmo (2009:21), yaitu : akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dan akuntabilitas horisontal (horizontal accountability). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan rakyat.

Menurut Mahmudi (2011:19) menjelaskan akuntabilitas memiliki lima dimensi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu : (a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum yakni akuntabilitas lembaga lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapat otorisasi. (b) . Akuntabilitas manajerial adalah pertanggung jawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidak efektifan organisasi. (c) Akuntabilitas program, yaitu lembaga-lembaga publik harus mepertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan bermanfaat untuk rakyat bukan sekedar program untuk menghabiskan anggaran yang tidak jelas tujuannya. (d) Akuntabilitas kebijakan yakni terkait dengan pertanggung jawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan mana yang akan memperoleh manfaat dan kerugian atas kebijakan tersebut. Langkah apa yang dipersiapkan untuk mengantisipasi dampak negatif jika timbul. (e) Akuntabilitas finansial adalah pertanggung jawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik menjadi

perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga- lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Tugiman (2002:1) mengemukakan bahwa pengendalian internal terdiri dari rencana organisasi dan keseluruhan metode atau cara serta ukuran yang dikoordinasikan dengan tujuan mengamankan harta kekayaan, meneliti keakuratan dan dapat dipercaya data akuntansi, akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Agoes (2016 :100) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dan pengertian Pengendalian Internal sesuai dengan ISA 315 dalam Tuanakota (2015:93) adalah proses yang dirancang, diimplementasi, dan dipelihara oleh TCWG (*those charge wit governance*), manajemen dan karyawan lain untuk memberikan asurans yang memadai tentang tercapainya tujuan entitas mengenai keandalan pelaporan keuangan, efektif, danefisiennya operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa Pengendalian Intern terdiri dari 5 (lima) indikator yang saling berhubungan, yaitu: (a) Lingkungan pengendalian, meliputi penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. (b) Penilaian resiko yakni diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar instansi. Terhadap resiko yang telah diidentifikasi, dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen resiko dan kegiatan pengendalian resiko yang diperlukan untuk memperkecil resiko. (c) Kegiatan pengendalian, merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu Instansi Pemerintah dapat berbeda dengan yang diterapkan pada Instansi Pemerintah lain. Perbedaan penerapan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan visi, misi dan tujuan, lingkungan dan cara beroperasi, tingkat kerumitan organisasi, sejarah dan latar belakang. (d) Penyebaran komunikasi informasi. Pengendalian Informasi yang berhubungan perlu diidentifikasi, ditangkap dikomunikasikan dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan para pihak

memahami tanggung jawab. (e) Pemantauan. Diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidi, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian internal

Semakin baik sistem pengendalian intern maka semakin akurat laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amijaya (2019) dan Ayem & Kusumasari (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut,

Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah.

III. METODOLOGI

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat inspektorat yang ada di Sulawesi-Selatan. Penarikan sampel teknik *sampel jenuh* yaitu pengambilan seluruh populasi dijadikan sampel sehingga jumlah sampel sebanyak 49 auditor. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Jumlah kuesioner yang dapat dianalisis sebanyak 49 kuesioner yang diperoleh dari responden.

Teknik analisis untuk menjawab masalah dan menguji hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana, dengan persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta X + \epsilon$$

Keterangan :

- Y = Akuntabilitas laporan keuangan
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- X = Sistem pengendalian intern pemerintah
- ϵ = Error (Kesalahan Residual)

Hasil

Kuesioner dalam penelitian ini disebar kepada 49 responden yang tersebar di auditor inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut ini adalah tabel rincian penyebaran kuesioner.

Tabel 1. Rincian Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Jumlah kuesioner yang disebar	49	100%
2.	Jumlah kuesioner yang kembali	49	100%
3.	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0	0%
4.	Jumlah kuesioner yang bisa diolah	49	100%

Sumber : Data Primer (diolah, 2023)

Analisis regresi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS. Hasilnya dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Koefisien Regresi dan Uji Hipotesis

Model	Koefisien Regresi (β)	t hitung	p-value
Konstanta	18.113	7.919	.000
SPIP (X)	.241	2.543	.014

Variabel dependen : Akuntabilitas laporan keuangan

Sumber : data diolah dengan SPSS tahun 2023

Berdasarkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 0,241 terhadap akuntabilitas laporan keuangan dengan nilai konstanta 18,113. Dengan demikian terbentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 18.113 + 0,241X$$

Model ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif dari variable sistem pengendalian internal pemerintah (X) terhadap akuntabilitas laporan keuangan (Y).

Konstanta = 18.113 artinya jika tidak ada perubahan pada sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variable bebas, maka nilai akuntabilitas laporan keuangan sebesar 18.113 sebagai nilai konstanta variable terkait

$B_1 = 0,241$ berarti apabila sistem pengendalian internal pemerintah mengalami kenaikan 1% maka akuntabilitas laporan keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,241

Selanjutnya diketahui nilai t_{hitung} 2.543 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,678. dengan nilai signifikansi sebesar $0,014 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti dengan tingkat kepercayaan 95% Sistem pengendalian internal pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah provinsi sulawesi selatan

IV. PEMBAHASAN

Uji hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penerapan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah sangatlah penting dilakukan agar terhindar dari ketidakjelasan tugas dan menurunnya performa Aparatur Pemerintahan secara keseluruhan. Hal ini akan mengganggu keberlangsungan Aparatur Pemerintahan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penting bagi Pimpinan untuk tetap memerhatikan sistem pengendalian internal Pemerintah secara komprehensif guna mengoptimalkan kinerja dari aparatur Pemerintah dalam pengejian Laporan Keuangan pemerintah. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh khodija ishak dan Siti Amalia (2020) penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Keterbatasan.

Banyak faktor yang memengaruhi akuntabilitas laporan keuangan, namun . Sehingga eneliti hanya mengamati faktor sistem pengendalian intern. Sehingga penelitian selanjutnya perlu mengamati faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan. Dan penelitian ini berfokus pada sektor pemerintah, penelitian selanjutnya dapat meneliti pada perusahaan bisnis.

REFERENSI

- Dewi, S. R. K. (2546). *Pengaruh Kompetensi auditor, profesionalisme, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas audit pada kantor inspektorat provinsi sulsel*. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v7i2.2584>
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Ishak, K., & Amalia, S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 67–82. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.218> JNB
- Latifah, A. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 15.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Murshydi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. refika aditama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tetang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Per UU*, 53(9), 1689–1699.
- Rusvianto, D., Mulyani, S., & Yuliafitri, I. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Bandung). *Banque Syar'i*, 4(1), 267704.
- Sahala Purba, Rintan Saragih, & Tika Meisiska Br Sembiring. (2022). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 122–129.
- Suarmika, I. G. L., & Suputra, I. D. G. D. (2016). Kemampuan Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan SIKD Pada Kualitas LKPD Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(9), 2921–2950.